

**LKPJ**  
**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**



**DINAS PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. Majid Brangas Telp. (0742) 322733  
Email : [dpmd@tanjabarkab.go.id](mailto:dpmd@tanjabarkab.go.id) Kode Pos :36512  
KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, 2/ Januari 2019

Nomor : 050/44/SKR/DPMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Penyampaian data  
LKPJ Akhir Tahun  
Anggaran 2018**

Kepada  
Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat  
Cq. Kepala Bappeda  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Bappeda Nomor 050/14/V/Bappeda, tanggal 10 Januari 2019 dengan Perihal Permintaan Data LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018. Untuk itu kami sampaikan data yang dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS, *A*  
  
**H. MULYADI, S.Pd, M. Kes**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650110 198903 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan)
3. Arsip

## BAB IV

### URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah memandirikan masyarakat dan desa agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumberdaya alam dan manusia setempat sebaik mungkin.

Upaya selanjutnya adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Terkait hal tersebut, masih dihadapi berbagai permasalahan dalam memaknai konsep “community empowerment (pemberdayaan masyarakat)” sebagian masyarakat lokal dan pelaku pemberdayaan masyarakat masih terjebak dalam konsep lama yaitu “community development (pembangunan masyarakat)”. Pada kenyataannya masyarakat lokal masih lebih suka menikmati posisinya sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Pelaku pemberdayaan masyarakat juga masih lebih menyukai mekanisme “community development” yang lebih praktis dilakukan dibanding dengan “community empowerment” yang membutuhkan upaya ekstra untuk melakukan pendampingan demi hasil efektif dan efisien.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berusaha menjaga keseimbangan antara konsep development dan empowerment dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa. Tolok ukur keberhasilan konsep pemberdayaan masyarakat ini masih sulit diukur. yang pertama, pemberdayaan masyarakat sebetulnya merupakan “ruh” pembangunan itu sendiri yang idealnya menjadi sebuah mainstream dari setiap program yang mengikutsertakan masyarakat. Yang kedua, belum ada ukuran yang baku yang mempresentasikan “masyarakat yang berdaya atau masyarakat yang mandiri”. Jika pengukuran tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat, berdasarkan pada ciri pemberdayaan yang berpihak pada kaum lemah, maka indikator yang digunakan adalah menurunnya angka kemiskinan, akan tetapi indikator ini sebenarnya bersifat umum dan merupakan indikator dampak dari seluruh pembangunan yang dilaksanakan.

Sasaran pembangunan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, adalah;

- a. Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintahan desa
- b. Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang mandiri dan unggul
- c. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel
- d. Memperkuatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun dan pemenuhan layanan sosial dasar

## **I. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **A. PROGRAM PENDUKUNG**

#### **1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program yang diutamakan pada manajemen administrasi perkantoran. Tujuan program ini adalah untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran program ini adalah terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
- d. Penyediaan jasa Administrasi keuangan.
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman rapat.
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah.
- l. Penyediaan iklan layanan

## **2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan program yang diutamakan dalam upaya mendukung peningkatan kinerja personil.

Tujuan program ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Sasaran program ini adalah pengadaan dan perawatan kendaraan dinas, perawatan gedung kantor, perawatan dan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

## **3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai.**

Tujuan program ini adalah untuk mendorong dan memotivasi pegawai agar dapat melaksanakan kedisiplinan kepegawaian dalam rangka peningkatan kinerja. Sasaran program ini adalah terwujudnya disiplin pegawai. Kegiatan pokok yang dilaksanakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

## **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur pegawai. Sasaran bimbingan teknis (Bimtek)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah bimbingan teknis, kursus dan pelatihan

## **5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Tujuan program ini adalah untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja, menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan baik secara fisik maupun kinerja sebagai pertanggung jawaban dan kinerja OPD kepada Kepala Daerah

Sasaran program ini adalah penyusunan rencana kerja, laporan kinerja, laporan keuangan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.

## **B. PROGRAM URUSAN WAJIB**

### **6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

Tujuan program ini adalah Terwujudnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat

Sasaran program ini adalah menguatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan TTG, sosial budaya dan adat istiadat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- a. Tim Pembentukan Desa persiapan
- b. Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- c. Pembinaan dan lomba desa/kelurahan
- d. Evaluasi pemilihan kepala desa
- e. Pembinaan posyandu dan lingkungan bersih dan sehat
- f. Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan sistem keuangan desa
- g. Peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam membangun kawasan pedesaan
- h. Pembinaan, pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG
- i. Perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna
- j. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

### **7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

Tujuan program ini adalah terwujudnya keberdayaan kelembagaan sosial dan usaha ekonomi serta peran aktif masyarakat dalam menggali ekonomi pedesaan dan kawasan pedesaan.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang mandiri dan unggul.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

- b. Pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- c. Sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan

#### **8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**

Tujuan program ini adalah terwujudnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel. Sasaran program ini adalah pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pembinaan, monitoring Dana Desa
- b. Sosialisasi dan Monitoring BUM desa bersama

#### **9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**

Tujuan program ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa. Sasaran program ini adalah penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Penyusunan peraturan tata pemerintah desa
- c. Pembentukan Tim Pengelola Alokasi Dana Desa
- d. Fasilitasi penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
- e. Fasilitasi penguatan kapasitas perangkat desa

## **II. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **A. PROGRAM PENDUKUNG**

- a. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Pada program ini dengan anggaran sebesar Rp 1.542.260.741,- dapat direalisasikan sebesar Rp 1.435.710.890,- atau sebesar 93,09%. Semua kegiatan dapat berjalan baik dan lancar, dengan realiasi fisik mencapai 90,00%.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pada program ini dengan anggaran sebesar Rp 273.450.000,- direalisasikan sebesar Rp 225.649.024,- atau sebesar 82,52%. Semua kegiatan dapat berjalan baik dan lancar, dengan capaian realisasi fisik sebesar 96,00%.

c. Program peningkatan disiplin aparatur

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 16.800.000,- dengan realisasi keuangan 100%, dengan capaian realisasi fisik 100%.

d. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Pada program ini ada kegiatan pengembangan sumberdaya manusia, yang mempunyai anggaran sebesar Rp 25.000.000,-. Dapat direalisasikan hanya 6,40% atau sebesar Rp 1.600.000,- dengan capaian fisik 20,00% (hanya 1 orang) karena tidak adanya ajuan pelatihan yang baik dan sesuai dengan tugas dan jabatan yang ada.

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 33.970.500,- dengan realisasi keuangan 96,79% atau sebesar Rp 32.880.300,- dan capaian realisasi fisik 100%.

## **B. PROGRAM URUSAN WAJIB**

f. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 2.646.964.436,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.498.436.217,- atau 94,39% dan dengan realisasi fisik 100%. Pada program ini mempunyai target desa swasembada 12 desa swasembada dan tercapai sebanyak 12 desa swasembada, ini berarti telah berhasil mencapai target.

1. *Kegiatan Tim Pembentukan Desa Persiapan*

Kegiatan ini bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 141.700.000,- yang dapat realisasikan Rp 112.800.000,- atau sebesar 79,60% dengan relisasi fisik 100%.

2. *Kegiatan Pembinaan dan Lomba desa/keurahan*

Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan, melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan perkembangan desa dan kelurahan dan mengikutsertakan juara lomba di tingkat kabupaten dalam lomba desa/kelurahan tingkat provinsi dan atau nasional. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 95.240.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 89.400.000,- atau sebesar 93,87% dengan realisasi fisik 100%.

3. *Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan dan Pelatihan Sistem Keuangan Desa*

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan SDM operator dalam menjalankan aplikasi sistem keuangan desa dalam hal pengentrian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan meningkatkan kemampuan SDM operator dalam menjalankan aplikasi sistem keuangan desa dalam hal pengentrian penatausahaan.

Besaran anggaran kegiatan ini adalah Rp 157.220.400,- dapat direalisasikan sebesar Rp 157.220.400,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%.

4. *Kegiatan Peningkatan kapasitas kerjasama pembangunan kawasan perdesaan*

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kerjasama dalam pembangunan kawasan perdesaan, menyamakan persepsi tentang kelembagaan Badan kerjasama antar desa sesuai UU No.6 Tahun 2014, dan meningkatkan kapasitas BKAD di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Anggaran kegiatan ini adalah Rp 100.605.116,- yang direalisasikan sebesar Rp 100.603.350,- atau 99,99% dengan realisasi fisik 100%.

5. *Kegiatan Gerakan Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat (BBGRM)*

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Kesadaran dan semangat kegotong royongan masyarakat di Desa/Kelurahan sehingga terciptanya nilai-nilai luhur semangat gotong royong masyarakat Desa/Kelurahan. Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 109.720.000,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp 83.025.000,- atau sebesar 75,67% dengan realisasi fisik 100%.

6. *Kegiatan Pembinaan pemasyarakatan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG)*

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan/kemampuan pengurus Posyantek kecamatan serta terdorongnya kemampuan masyarakat untuk menerapkan dan

memanfaatkan hasil Teknologi Tepat Guna, terinventarisirnya alat- alat TTG temuan masyarakat, memberikan Kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi tentang alat Teknologi tepat Guna kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan alat-alat TTG. Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 63.277.420,- dengan realisasi Rp 62.977.420,- atau sebesar 99,53% dengan realisasi fisik 100%.

*7. Kegiatan Pembinaan posyandu dan lingkungan bersih dan sehat*

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan Fungsi dan Kinerja Posyandu dan terbinanya Kader-Kader Posyandu serta terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat. Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 60.100.000,- dengan realisasi Rp 57.700.000,- atau sebesar 96,01% dengan realisasi fisik 100%.

*8. Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 1.306.251.500,- dengan realisasi Rp 1.243.416.797,- atau sebesar 95,19% dengan realisasi fisik 100%.

*9. Kegiatan Evaluasi pemilihan kepala desa*

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu desa dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebanyak 15 kepala desa. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 523.550.000,- dengan realisasi Rp 516.798.250,- atau sebesar 98,71% dengan realisasi fisik 100%.

*10. Kegiatan Perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna*

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 89.300.000,- dengan realisasi Rp 74.495.000,- atau sebesar 83,42% dengan realisasi fisik 100%.

**g. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan**

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 329.779.322,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 328.519.806,- atau 99,62% dengan capaian realisasi fisik 100%. Target pada program ini adalah terbentuknya 95 BUM desa dan tercapai sebanyak 104 BUM desa, hal ini berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

*1. Kegiatan sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan*

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, memberdayakan masyarakat desa

dalam pengembangan ekonomi kawasan perdesaan dan mengembangkan potensi kawasan perdesaan yang ada.

Anggaran kegiatan ini Rp 122.401.766,- dapat direalisasikan Rp 121.142.250,- atau sebesar 98,97% dengan realisasi fisik 100%.

#### 2. *Kegiatan Pembinaan P2WKSS*

Kegiatan ini bertujuan mewujudkan Keluarga Sehat dan Sejahtera khususnya meningkatkan peranan wanita/ibu-ibu rumah tangga melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, peningkatan status pendidikan, kesehatan lingkungan dan ekonomi keluarga guna mewujudkan usaha keluarga yang berkualitas serta mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengembangannya kepada masyarakat

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 123.260.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 123.260.000,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%.

#### 3. *Kegiatan Pembinaan dan pengembangan BUM Desa*

Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai meningkatnya Pengetahuan pengurus BUM Desa dalam pengelolaan keuangan BUM Desa Tahun 2018, meningkatnya ketrampilan pengurus BUM Desa dalam menjalankan usaha dan pengembangan usaha yang dilakukan, meningkatnya ketrampilan pengurus BUM Desa untuk menyampaikan laporan keuangan desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga desa, menyamakan persepsi bahwa BUM Desa hadir di desa sebagai tulang punggung perekonomian Desa dan BUM Desa di desa bukan menjadi pelaku memonopoli kegiatan perekonomian Desa tapi sebagai pengendali pertumbuhan ekonomi desa. Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 84.117.556,- yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 84.117.556,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%.

#### **h. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 218.867.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 218.867.000,- atau 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Target pada program ini adalah terbentuknya 2 BUM desa bersama dan yang terbentuk tahun ini adalah 3 BUM desa bersama, yang berarti telah tercapai target yang seharusnya, yang di kecamatan merlung belum berjalan menunggu APBDes.

1. *Kegiatan pembinaan BUM desa bersama dan fasilitasi pengembangan penghidupan berkelanjutan*

Kegiatan ini bertujuan memotivasi dalam pembentukan BUM desa bersama di setiap kecamatan dan mewujudkan pengetahuan masyarakat dalam pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dengan anggaran sebesar Rp 112.925.000,- direalisasikan sebesar Rp 112.925.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%.

2. *Kegiatan Pembinaan monitoring Dana Desa*

Tujuan pelaksanaan kegiatan monitoring dana desa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pengetahuan Kepala Desa dan perangkatnya dalam pengelolaan Dana desa Tahun 2018
- b. Meningkatnya ketrampilan pelaku Dana Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 105.942.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 105.942.000,- atau sebesar 100% dengan realisasi fisik 100%.

**i. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 883.625.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 782.771.500,- atau 88,59% dengan realisasi fisik 90,20%. Target capaian program ini adalah pembinaan terhadap 114 desa, dan telah dilakukan pembinaan terhadap 114 desa tersebut.

1. *Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa*

Kegiatan ini mempunyai tujuan meningkatkan koordinasi antar pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 131.000.000,- yang direalisasikan sebesar Rp 89.700.000,- atau sebesar 68,47% dengan realisasi fisik 75%.

2. *Kegiatan Tim Pengelola Anggaran Dana Desa*

Kegiatan ini bertujuan memberikan supervisi pengelolaan anggaran dana desa, memberikan supervisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa, dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa. Jumlah anggaran kegiatan ini adalah Rp 118.874.000,- yang terealisasikan sejumlah Rp 115.610.500,- atau sebesar 97,25% dengan realisasi fisik 100%.

3. *Kegiatan Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa*

Kegiatan ini bertujuan menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang badan permusyawaratan desa dan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang perubahan status sebagian kelurahan menjadi desa. Anggaran kegiatan ini Rp 98.050.000,- dengan realisasi Rp 76.900.000,- atau 78,43% dengan realisasi fisik 100%.

4. *Kegiatan Fasilitasi penguatan kapasitas badan permusyawaratan desa*

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas Badan Permasyarakatan Desa dalam fungsi pemerintahan desa. Anggaran kegiatan ini Rp 182.669.000,- dengan realisasi Rp 172.799.000,- atau 94,60% dengan realisasi fisik 84,00%.

5. *Kegiatan Fasilitasi penguatan kapasitas perangkat desa*

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas Badan Permasyarakatan Desa dalam fungsi pemerintahan desa. Anggaran kegiatan ini Rp 353.032.000,- dengan realisasi Rp 327.762.000,- atau 92,84% dengan realisasi fisik 92,00%.

### III. Permasalahan dan Solusi

#### I. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. *Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan Sistem keuangan desa*

# Permasalahan;

- a. Operator Siskeudes adalah orang yang menguasai komputer tetapi tidak menguasai akuntansi
- b. Sering terjadi pergantian operator
- c. Kurangnya kerjasama antar operator dan bendahara
- d. Tidak ada laptop khusus Siskeudes, sehingga terganggu dengan pekerjaan lain

# Solusi;

- a. Memberi saran kepada Kepala Desa agar menunjuk operator yang juga mengerti dan mengurus keuangan desa
- b. Memberi saran kepada Kades agar tidak mengganti operator minimal selama 2(dua) tahun.
- c. Memberi saran kepada kepala desa agar menyediakan laptop khusus untuk aplikasi Siskeudes.

2. *Kegiatan peningkatan kapasitas kerjasama kawasan perdesaan*

# Permasalahan;

- a. Masih terdapat perbedaan persepsi terhadap Tupoksi Badan Kerjasama Antar Desa Eks PNPM dengan BKAD sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014
- b. Kurangnya dukungan penganggaran kegiatan untuk BKAD di Tingkat Kecamatan
- c. Adanya BKAD yang kurang aktif
- d. Perlunya dukungan lintas program dan lintas sektoral

# Solusi;

- a. Memberikan sosialisasi dan Bimbingan teknis tentang BKAD
- b. Mendorong Kecamatan agar menganggarkan kegiatan BKAD
- c. Memfasilitasi kegiatan BKAD dan
- d. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi

3. *Kegiatan tim pembentukan desa persiapan*

# Permasalahan;

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat desa/kelurahan tentang tujuan penataan desa
- b. Ego masyarakat kelurahan yang gengsi mengusulkan perubahan status kelurahan menjadi desa
- c. Kurangnya keterampilan staf Dinas PMD dalam membuat peta desa

#Solusi;

- a. Mensosialisasikan penataan desa kepada masyarakat desa dan kelurahan
- b. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi
- c. Mengikutsertakan staf Dinas PMD dalam pelatihan/diklat Geospasial

4. *Kegiatan pembinaan dan lomba desa/kelurahan*

#Permasalahan;

- a. Pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi terlalu cepat dari yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
- b. Kecamatan terlambat melaksanakan evaluasi dan analisa kecocokan data hasil pengungkap data dari desa dan kelurahan mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten
- c. Desa dan kelurahan terlambat memberikan laporan pengungkap data perkembangan desa dan kelurahan

#Solusi:

- a. Mempercepat pelaksanaan pengungkap data dari desa dan kelurahan
- b. Mendorong kecamatan untuk mempercepat pelaksanaan evaluasi dan analisa kecocokan data hasil pengungkap data dari desa dan kelurahan
- c. Mempercepat pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten
- d. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi

## **II. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan**

### *1. Kegiatan sosialisasi dan pengembangan ekonomi kawasan pedesaan*

# Permasalahan:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di kawasan perdesaan
3. Kurangnya sumber daya manusia dalam melihat potensi ekonomi yang ada dikawasan perdesaan

# Solusi:

Mengajak stake holder yang berkepentingan untuk mengembangkan potensi ekonomi kawasan perdesaan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

### *2. Kegiatan Pembinaan P2WKSS*

# Permasalahan:

- a. Data Dasar peserta/anggota binaan harus benar-benar yang pra sejahtera
- b. Kurang sinkronnya bantuan yang diberikan oleh OPD kepada anggota P2WKSS ( mana yang lebih diprioritaskan )
- c. Bantuan Stimulan WC yang diberikan oleh anggota P2WKSS masih sebatas menerima apa yang diberikan bantuan
- d. Partisipasi Masyarakat untuk ikut aktif masih kurang dalam program P2WKSS
- e. Bantuan Kolam ikan terpal dan benih ikan yang diberikan hanya sebatas untuk kelompok P2WKSS
- f. Kurangnya peran serta Babinsa dalam mendukung Program P2WKSS ( gotong royong bersama membersihkan lingkungan )
- g. Rapat Pokja hanya dihadiri sebatas Kabid ataupun Kasi sehingga tidak dapat mengambil keputusan

# Solusi:

- a. Peran serta OPD dan Kontribusi bantuan yang diberikan untuk di tingkatkan
- b. Data dasar peserta anggota P2WKSS agar betul-betul diverifikasi dan disesuaikan dengan data penduduk Pra Sejahtera dari Dinas Sosial serta perlu dibentuk Tim kecil dalam hal ini Tim Verifikasi data anggota P2WKSS terdiri dari: Dinas PMD, Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas DukCapil, Dinas Kesehatan dan Bappeda.
- c. Peran serta Babinsa perlu ditingkatkan dalam mendukung program P2WKSS khususnya kegiatan gotong royong bersama membersihkan lingkungan
- d. Program P2WKSS pada saat penilaian Tingkat Provinsi dapat dilaksanakan Pelayanan KB, Pelayanan KK dan KTP, Minat Baca Anak dengan diikutsertakan Mobil Pintar Dari Dinas Perpustakaan dan kearsipan
- e. Perlu ditingkatkan budaya hidup bersih dengan menyiapkan cuci tangan di setiap rumah
- f. Rapat Pokja untuk dihadiri oleh Kepala OPD dan selanjutnya dapat diteruskan oleh Kabid ataupun Kasi melaksanakan kegiatan
1. *Kegiatan pembinaan dan pengembangan BUM desa*

# Permasalahan:

- a. Perjalanan dinas dalam daerah yang direncanakan untuk Kegiatan monitoring dan bimbingan teknis tidak berjalan maksimal dikarenakan adanya kegiatan dari lintas sektor dan program yang harus diikuti baik itu dari provinsi maupun kabupaten.
- b. Modal yang dianggarkan untuk usaha BUM desa di dalam APBDesa tahun 2018 kebanyakan diserahkan pada pencairan Dana Desa Tahap III, sementara pendirian dan penunjukan pengurus BUM desa dilakukan diawal tahun.
- c. Jam pelatihan masih terlalu sedikit yang hanya 14 jam pembelajaran.

# Solusi:

- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana/anggaran kas yang sudah disusun sehingga pelaksanaan kegiatan tepat waktu efisien dan berhasil guna.
- b. Modal untuk BUM Desa diserahkan sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa sehingga BUM Desa berjalan sesuai dengan rencana usaha.
- c. Jam pelatihan ditambah menjadi 24 jam sehingga ada penyesuaian anggaran.

### **III. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**

1. *Kegiatan Sosialisasi dan monitoring BUM desa bersama dan Fasilitasi pengembangan penghidupan berkelanjutan*

# Permasalahan:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat perdesaan dalam pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
- b. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di kawasan perdesaan
- c. Kurangnya sumberdaya manusia dalam melihat potensi ekonomi yang ada di kawasan perdesaan

# Solusi:

- a. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang BUM desa bersama
- b. Mendorong kecamatan untuk mendirikan BUM desa bersama di setiap kecamatan
- c. Mendorong kepala desa untuk penyertaan modal untuk BUM desa bersama.

2. *Kegiatan Pembinaan monitoring dana desa*

# Permasalahan:

- a. Dalam kegiatan monitoring dan bimbingan teknis pelaksanaan dana desa terkendala oleh desa itu sendiri yang lambat memenuhi syarat pencairan dana desa, syarat pencairan dana desa yaitu APBDES dan RAB serta gambar bagi kegiatan pembangunan infrastruktur desa, ini mempengaruhi jadwal pembinaan ke desa-desa.
- b. Adanya regulasi dari pemerintah pusat yang keluar ditengah pelaksanaan dana desa sehingga terlambat disosialisasikan ke desa, ini mempengaruhi proses pencairan dana desa tahap kedua.
- c. Kegiatan monitoring evaluasi dana desa dilakukan hanya satu kali untuk satu desa dalam setahun, tentunya ini kurang untuk mengevaluasi laporan kegiatan desa.
- d. Di Tahun 2018 banyak desa yang anggota BPDnya habis masa jabatan sehingga mengganggu rangkaian pelaksanaan pembangunan di desa.

# Solusi:

- a. Mendorong desa untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan dan pelaporan sesuai aturan yang berlaku sehingga tahapan monitoring dan bimbingan teknis bisa dilakukan lebih efektif, efisien dan tepat guna dalam arti masing-masing desa tentunya permasalahan tidak sama.
- b. Permintaan dana disesuaikan dengan rencana kegiatan yang sudah disusun, dan dana yang sudah diserahkan untuk segera menyelesaikan administrasi pertanggung jawabannya sehingga tidak mengganggu proses pencairan dana berikutnya.

#### **IV. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**

1. *Kegiatan pembentukan tim pengelola anggaran dana desa*

# Permasalahan;

- a. Kurangnya kualitas SDM perangkat desa
- b. Kepala desa dan perangkat desa terkesan menyepelekan administrasi pengelolaan kekayaan dan aset desa

# Solusi;

- a. Memberikan supervisi pengelola Anggaran dana desa kepada kepala desa dan perangkat desa
  - b. Memfasilitasi pelatihan awal masa jabatan aparatur pemerintahan desa
  - c. Memberikan sanksi terhadap kepala desa yang tidak melaksanakan tertib administrasi
  - d. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi
2. *Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa*

# Permasalahan;

- a. Kegiatan Rakor pemerintahan desa triwulan IV tidak dapat terlaksana karena bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi peningkatan kapasitas BPD dan Perangkat desa serta Pemilihan kepala desa
- b. Kekurangan personil dalam penyelenggaraan kegiatan.

# Solusi;

Mengupayakan pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun, serta menambah personil dan meningkatkan kapasitas personil yang ada saat ini.

3. *Kegiatan Evaluasi pemilihan kepala desa*

# Permasalahan;

- a. Keterlambatan penetapan dan pengesahan peraturan daerah tentang Pemilihan kepala desa
- b. Kurangnya inisiatif pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, serta panitia pemilihan kepala desa dalam upaya memahami peraturan pemilihan kepala desa

# Solusi;

Melaksanakan sosialisasi peraturan pemilihan kepala desa kepada pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan panitia pemilihan kepala desa.

Target program di RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut;

1. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dengan target akhir RPJMD 90% dengan capaian 55,40% sedikit kurang dari target 60% Tahun 2018.
2. Jumlah desa Swasembada dengan target akhir RPJMD 15 Desa Swasembada dan capaian Tahun 2018 12 Desa Swasembada sesuai target Tahun 2018
3. Jumlah BUM Desa yang terbentuk dengan target akhir 114 BUM desa sudah tercapai 104 BUM Desa telah melampaui target 95 BUM Desa
4. Jumlah BUM Desa Bersama yang terbentuk di setiap kecamatan dengan target akhir RPJMD 13 BUM desa bersama sudah terbentuk 6 BUM Desa Bersama
5. Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang baik sudah terealisasi pada 114 desa.

**Jumlah dan Realisasi Penggunaan Anggaran  
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018**

PROGRAM	ANGGARAN		Realisasi		Fisik (%)
	Jumlah	Proporsi (%)	Keterangan		
			Jumlah	%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.542.260.741	25,83	1.435.710.890	93,09	90,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	273.450.000	4,58	225.649.024	82,52	96,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.800.000	0,28	16.800.000	100,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	0,42	1.600.000	6,40	20,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.970.500	0,57	32.880.300	96,79	100,00
Program : Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	2.646.964.436	44,33	2.498.436.217	94,39	100,00
Program : Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	329.779.322	5,52	328.519.806	99,62	100,00
Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	218.867.000	3,67	218.867.000	100,00	100,00
Program : Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	883.625.000	14,80	782.771.500	88,59	90,20
<b>Jumlah 2018</b>	<b>5.970.716.999</b>	<b>100</b>	<b>5.541.234.737</b>	<b>92,81</b>	<b>93,28</b>
		<b>4.961.186.429</b>	<b>4.466.499.744</b>	<b>90,03</b>	<b>95,70</b>

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**H. MULYADI, S.Pd, M.Kes**  
NIP. 19650110 198903 1 011

**Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018**

No.	Program dan Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	
					Keuangan	Fisik
	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.498.973.603</b>	<b>1.542.260.741</b>	<b>1.435.710.890</b>	<b>93,09%</b>	<b>90,00%</b>
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,00%	100,00%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.000.000	107.400.000	67.776.162	63,11%	100,00%
04	Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	-	350.000	350.000	100,00%	100,00%
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	130.920.000	130.920.000	130.920.000	100,00%	100,00%
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.371.352	16.371.352	16.371.352	100,00%	100,00%
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.899.606	54.899.606	54.899.606	100,00%	100,00%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.088.295	72.088.295	72.088.295	100,00%	100,00%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	10.453.100	10.453.100	10.453.100	100,00%	100,00%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	7.200.000	6.700.000	93,06%	100,00%
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.280.000	11.280.000	3.970.000	35,20%	50,00%
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.061.061.250	1.113.598.388	1.065.632.375	95,69%	100,00%
28	Penyediaan Iklan Layanan	15.600.000	15.600.000	4.450.000	28,53%	30,00%
III	<b>Program : Peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>180.300.000</b>	<b>273.450.000</b>	<b>225.649.024</b>	<b>82,52%</b>	<b>96,00%</b>
09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	35.000.000	34.650.000	99,00%	100,00%
12	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.000.000	41.750.000	41.190.000	98,66%	100,00%
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	39.000.000	79.000.000	42.333.000	53,59%	80,00%
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	99.450.000	100.850.000	90.716.024	89,95%	100,00%
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.850.000	16.850.000	16.760.000	99,47%	100,00%
III	<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>16.800.000</b>	<b>16.800.000</b>	<b>16.800.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	16.800.000	16.800.000	16.800.000	100,00%	100,00%
IV	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>6,40%</b>	<b>20,00%</b>
1	Pengembangan SDM	25.000.000	25.000.000	1.600.000	6,40%	20,00%
V	<b>Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja</b>	<b>33.970.500</b>	<b>33.970.500</b>	<b>32.880.300</b>	<b>96,79%</b>	<b>100,00%</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	33.970.500	33.970.500	32.880.300	96,79%	100,00%

No.	Program dan Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	
					Keuangan	Fisik
	<b>Program : Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</b>	<b>2.646.964.436</b>	<b>2.646.964.436</b>	<b>2.498.436.217</b>	<b>94,39%</b>	<b>100,00%</b>
	Tim pembentukan desa persiapan	141.700.000	141.700.000	112.800.000	79,60%	100,00%
	Gerakan bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM)	109.720.000	109.720.000	83.025.000	75,67%	100,00%
	Pembinaan dan lomba desa/kelurahan	95.240.000	95.240.000	89.400.000	93,87%	100,00%
	Evaluasi Pemilihan kepala desa	523.550.000	523.550.000	516.798.250	98,71%	100,00%
	Pembinaan posyandu dan lingkungan bersih dan sehat	60.100.000	60.100.000	57.700.000	96,01%	100,00%
	Penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan sistem keuangan desa	157.220.400	157.220.400	157.220.400	100,00%	100,00%
	Peningkatan kapasitas kerjasama pembangunan kawasan pedesaan	100.605.116	100.605.116	100.603.350	99,99%	100,00%
	Pembinaan, Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Gelar TTTG	63.277.420	63.277.420	62.977.420	99,53%	100,00%
	Perlombaan sekretariat posyantek dan alat-alat teknologi tepat guna	89.300.000	89.300.000	74.495.000	83,42%	100,00%
	Pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	1.306.251.500	1.306.251.500	1.243.416.797	95,19%	100,00%
	<b>Program : Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	<b>329.779.322</b>	<b>329.779.322</b>	<b>328.519.806</b>	<b>99,62%</b>	<b>100,00%</b>
	Pembinaan P2W-KSS	123.260.000	123.260.000	123.260.000	100,00%	100,00%
	Sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan pedesaan	122.401.766	122.401.766	121.142.250	98,97%	100,00%
	Pembinaan dan pengembangan Bumdes	84.117.556	84.117.556	84.117.556	100,00%	100,00%
	<b>Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>218.867.000</b>	<b>218.867.000</b>	<b>218.867.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Pembinaan monitoring dana desa	105.942.000	105.942.000	105.942.000	100,00%	100,00%
	Pembinaan dan monitoring BUM desa bersama dan fasilitasi pengembangan penghidupan berkelanjutan	112.925.000	112.925.000	112.925.000	100,00%	100,00%
	<b>Program : Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>329.624.000</b>	<b>883.625.000</b>	<b>782.771.500</b>	<b>88,59%</b>	<b>90,20%</b>
	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa	112.700.000	131.000.000	89.700.000	68,47%	75,00%
	Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa	98.050.000	98.050.000	76.900.000	78,43%	100,00%
	Pembentukan tim pengelola alokasi dana desa	118.874.000	118.874.000	115.610.500	97,25%	100,00%
	Fasilitasi penguatan kapasitas badan permusyawaratan desa		182.669.000	172.799.000	94,60%	84,00%
	Fasilitasi penguatan kapasitas perangkat desa		353.032.000	327.762.000	92,84%	92,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.280.278.861</b>	<b>5.970.716.999</b>	<b>5.541.234.737</b>	<b>92,81%</b>	<b>93,28%</b>

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. MUJYADI, S.Pd, M.Kes  
NIP. 19850110 198903 1 011